



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPIK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa peran pupuk sangat penting dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura untuk mewujudkan Ketahanan Pangan baik Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau maupun Nasional, maka pemerintah telah memberikan subsidi pupuk tertentu kepada petani;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan baik pengadaan maupun penyalurannya, agar distribusinya tepat sasaran dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, maka dipandang perlu mengatur alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi;
 - d. bahwa berdasarkan atas dasar pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

REKAM BUKU (PARTIAL) TAHUN 1953

REKAM BUKU (PARTIAL) TAHUN 1953

REKAM BUKU

REKAM BUKU (PARTIAL) TAHUN 1953
REKAM BUKU (PARTIAL) TAHUN 1953
REKAM BUKU (PARTIAL) TAHUN 1953
REKAM BUKU (PARTIAL) TAHUN 1953

REKAM BUKU (PARTIAL) TAHUN 1953

REKAM BUKU (PARTIAL) TAHUN 1953

1. Rekam buku (partial) tahun 1953
Rekam buku (partial) tahun 1953
Rekam buku (partial) tahun 1953
Rekam buku (partial) tahun 1953
Rekam buku (partial) tahun 1953
2. Rekam buku (partial) tahun 1953
Rekam buku (partial) tahun 1953
Rekam buku (partial) tahun 1953
Rekam buku (partial) tahun 1953
Rekam buku (partial) tahun 1953
3. Rekam buku (partial) tahun 1953
Rekam buku (partial) tahun 1953
Rekam buku (partial) tahun 1953
Rekam buku (partial) tahun 1953
Rekam buku (partial) tahun 1953
4. Rekam buku (partial) tahun 1953
Rekam buku (partial) tahun 1953
Rekam buku (partial) tahun 1953
Rekam buku (partial) tahun 1953
Rekam buku (partial) tahun 1953
5. Rekam buku (partial) tahun 1953
Rekam buku (partial) tahun 1953
Rekam buku (partial) tahun 1953
Rekam buku (partial) tahun 1953
Rekam buku (partial) tahun 1953

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang *Badan Usaha Milik Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2008 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011.
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
20. Peraturan Gubernur Riau Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Propinsi Riau Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Kecamatan adalah Kecamatan se Kabupaten Rokan Hulu;
5. Camat adalah Camat se Kabupaten Rokan Hulu;
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;

1. Berikanlah definisi dari apa yang dimaksud dengan ...
2. Jelaskanlah ...
3. ...

4. ...
5. ...
6. ...

7. ...
8. ...
9. ...

10. ...
11. ...
12. ...

13. ...
14. ...
15. ...

16. ...
17. ...
18. ...

19. ...
20. ...
21. ...

22. ...
23. ...
24. ...

DAFTAR PUSTAKA

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

DAFTAR ISI

1. ...
2. ...
3. ...

DAFTAR LAMPIRAN

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

7. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
8. *Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;*
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007;
10. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah ditingkat pengecer resmi di Lini IV;
11. Sektor Pertanian adalah Sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang ;
12. Dinas Teknis adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Rokan Hulu
13. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin sesuai dengan peraturan perundangan;
14. Pekebun adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat;
15. Peternak adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha;
16. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang memiliki izin usaha;
17. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, dan SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri, yang terdiri dari PT.Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT.Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT.Petrokimia Gresik;
18. Distributor Pupuk adalah badan usaha yang sah ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi dan atau kelompok tani melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di wilayah *yang menjadi tanggung jawabnya;*
19. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan hukum yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (kelompok tani);
20. Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi oleh produsen;
21. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini I sampai Lini IV (Pengecer resmi / Kelompok tani);
22. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk dalam negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor;
23. Lini II adalah lokasi gudang pupuk milik produsen pada wilayah Provinsi;

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the President of the United States, dated January 1, 1865.

2. The second part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865, regarding the state of the Union.

3. The third part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865, regarding the state of the Union.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865, regarding the state of the Union.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865, regarding the state of the Union.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865, regarding the state of the Union.

7. The seventh part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865, regarding the state of the Union.

8. The eighth part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865, regarding the state of the Union.

9. The ninth part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865, regarding the state of the Union.

10. The tenth part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865, regarding the state of the Union.

11. The eleventh part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865, regarding the state of the Union.

12. The twelfth part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865, regarding the state of the Union.

13. The thirteenth part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865, regarding the state of the Union.

14. The fourteenth part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865, regarding the state of the Union.

15. The fifteenth part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865, regarding the state of the Union.

24. Lini III adalah lokasi gudang pupuk milik produsen dan atau distributor yang ditunjuk produsen pada wilayah kabupaten;
25. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer yang ditunjuk atau yang ditetapkan distributor;
26. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
27. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
28. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk kerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang diukuhkan oleh camat atau pejabat yang ditunjuk;
29. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani anggota kelompok tani mengacu pada rekomendasi pemupukan spesifik lokasi;
30. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat propinsi dan oleh Bupati untuk tingkat kabupaten;

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam perkeluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi kabupaten dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan Menteri Pertanian dan Gubernur Riau.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX dan Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



1. The first part of the document is a list of names and titles, including 'The Hon. Mr. Justice Gault' and 'The Hon. Mr. Justice Gault'.

2. The second part of the document is a list of names and titles, including 'The Hon. Mr. Justice Gault' and 'The Hon. Mr. Justice Gault'.

3. The third part of the document is a list of names and titles, including 'The Hon. Mr. Justice Gault' and 'The Hon. Mr. Justice Gault'.

4. The fourth part of the document is a list of names and titles, including 'The Hon. Mr. Justice Gault' and 'The Hon. Mr. Justice Gault'.

5. The fifth part of the document is a list of names and titles, including 'The Hon. Mr. Justice Gault' and 'The Hon. Mr. Justice Gault'.

6. The sixth part of the document is a list of names and titles, including 'The Hon. Mr. Justice Gault' and 'The Hon. Mr. Justice Gault'.

7. The seventh part of the document is a list of names and titles, including 'The Hon. Mr. Justice Gault' and 'The Hon. Mr. Justice Gault'.

THE HON. MR. JUSTICE GAULT

Part I

1. The first part of the document is a list of names and titles, including 'The Hon. Mr. Justice Gault' and 'The Hon. Mr. Justice Gault'.

2. The second part of the document is a list of names and titles, including 'The Hon. Mr. Justice Gault' and 'The Hon. Mr. Justice Gault'.

THE HON. MR. JUSTICE GAULT

Part II

1. The first part of the document is a list of names and titles, including 'The Hon. Mr. Justice Gault' and 'The Hon. Mr. Justice Gault'.

2. The second part of the document is a list of names and titles, including 'The Hon. Mr. Justice Gault' and 'The Hon. Mr. Justice Gault'.

- (3) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh petani berdasarkan RDKK yang disetujui oleh penyuluh, Kepala Unit Pelayanan Tehknis Dinas (UPTD) dan Kepala Desa Setempat, sedangkan persetujuan/penolakan atas rekapitulasi RDKK yang diajukan oleh kelompok tani dilakukan oleh Kepala Dinas Teknis.
- (4) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan dan tanaman hortikultura yang akan dibeli oleh petani.
- (5) Dinas teknis wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani diwilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan rekomendasi masing-masing Kepala Dinas Teknis Kabupaten sesuai dengan realokasi yang diusulkan Kepala Cabang Dinas Teknis Kecamatan.
- (3) Apabila alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi pada bulan yang bersangkutan, tidak tersalurkan dan atau tidak mencukupi maka dapat diambil dari alokasi dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya sepanjang tidak melebihi alokasi 1 (satu) tahun yang ditetapkan pada wilayah tersebut, dengan ketentuan :
 - a. Dalam wilayah kecamatan setelah mendapat rekomendasi Kepala UPTD Wilayah sesuai dengan peruntukannya.
 - b. Dalam wilayah Kabupaten setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Teknis sesuai dengan peruntukannya.

BAB IV PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik (Urea, SP-36, ZA, dan NPK) dan pupuk organik yang diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya dan PT. Petrokimia Gresik.
- (3) PT. Pupuk Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Urea.
- (4) PT. Petrokimia Gresik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik.



(1) The first section of the Act provides that the Secretary of the Interior shall have the honor to receive and accept of the President the oath of office and qualification of the Secretary of the Interior.

(2) The second section of the Act provides that the Secretary of the Interior shall have the honor to receive and accept of the President the oath of office and qualification of the Secretary of the Interior.

(3) The third section of the Act provides that the Secretary of the Interior shall have the honor to receive and accept of the President the oath of office and qualification of the Secretary of the Interior.

Section 4

(1) The fourth section of the Act provides that the Secretary of the Interior shall have the honor to receive and accept of the President the oath of office and qualification of the Secretary of the Interior.

(2) The fifth section of the Act provides that the Secretary of the Interior shall have the honor to receive and accept of the President the oath of office and qualification of the Secretary of the Interior.

(3) The sixth section of the Act provides that the Secretary of the Interior shall have the honor to receive and accept of the President the oath of office and qualification of the Secretary of the Interior.

(4) The seventh section of the Act provides that the Secretary of the Interior shall have the honor to receive and accept of the President the oath of office and qualification of the Secretary of the Interior.

(5) The eighth section of the Act provides that the Secretary of the Interior shall have the honor to receive and accept of the President the oath of office and qualification of the Secretary of the Interior.

Section 5

The ninth section of the Act provides that the Secretary of the Interior shall have the honor to receive and accept of the President the oath of office and qualification of the Secretary of the Interior.

Section 6

(1) The tenth section of the Act provides that the Secretary of the Interior shall have the honor to receive and accept of the President the oath of office and qualification of the Secretary of the Interior.

(2) The eleventh section of the Act provides that the Secretary of the Interior shall have the honor to receive and accept of the President the oath of office and qualification of the Secretary of the Interior.

(3) The twelfth section of the Act provides that the Secretary of the Interior shall have the honor to receive and accept of the President the oath of office and qualification of the Secretary of the Interior.

(4) The thirteenth section of the Act provides that the Secretary of the Interior shall have the honor to receive and accept of the President the oath of office and qualification of the Secretary of the Interior.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepenyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Pupuk bersubsidi di tingkat Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Teknis melakukan pendataan RDKK diwilayahnya,
- (4) Apabila petani tidak melakukan penebusan pupuk bersubsidi sesuai dengan pesanan dalam RDKK, Penyalur Lini IV tidak dapat menjual kepada pihak lain kecuali atas pertimbangan tertulis oleh Kepala Dinas Teknis sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"

Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), Distributor, dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak budidaya ikan dan atau udang diwilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Produsen, Distributor dan Penyalur Lini IV menyalurkan pupuk bersubsidi harus sesuai dengan prinsip "enam tepat" (jenis, jumlah, mutu, tempat, harga eceran tertinggi serta waktu pengadaan dan penyaluran)
- (3) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Teknis untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai dengan realokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4.

Pasal 9

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = Rp. 1.600,- per kg;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
 - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) = Rp. 2.300,- per kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 700,- per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidayaan ikan dan atau udang secara tunai di pengecer resmi dalam kemasan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) = 50 kg atau 20 kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;

BAB V DISTRIBUTOR DAN PENGEKER RESMI

Pasal 10

- (1) Distributor pupuk wajib memiliki kantor dan pengurus yang aktif untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan serta wajib memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di tempat kedudukan/wilayah tanggungjawabnya.
- (2) Distributor dengan persetujuan produsen wajib menunjuk dan menempatkan pengecer resmi pada setiap daerah sentra produksi masing-masing subsektor sesuai dengan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan Bupati.
- (3) Pengecer resmi melaksanakan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada petani atau kelompok tani sebagai konsumen akhir menurut alokasi peruntukan masing-masing sub sektor dalam wilayah tanggungjawabnya.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip “ enam tepat “.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Pestisida di Kabupaten dan Kecamatan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 13

- (1) Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten setiap bulannya secara berkala kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas teknis terkait Kabupaten serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten.
- (2) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasanya setiap bulan secara berkala kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas tehknis terkait Kabupaten serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten.
- (3) Pengecer resmi wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasanya setiap bulan secara berkala kepada Dinas Teknis/ Instansi terkait Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Kepala Unit Pelayanan Tehknis Dinas (UPTD) Dinas Teknis wajib menyampaikan laporan penyaluran dan pendistribusian pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Dinas Teknis Kabupaten.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.


Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 1 Juni 2011


BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD


Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 2 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,


INDAMRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19580413 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR :

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work done during the year.

2. The second part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

3. The third part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

4. The fourth part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

5. The fifth part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

6. The sixth part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

REPORT ON THE WORK OF THE DEPARTMENT

The seventh part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

The eighth part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

REPORT ON THE WORK OF THE DEPARTMENT

REPORT ON THE WORK OF THE DEPARTMENT

REPORT ON THE WORK OF THE DEPARTMENT

REPORT ON THE WORK OF THE DEPARTMENT

REPORT ON THE WORK OF THE DEPARTMENT

REPORT ON THE WORK OF THE DEPARTMENT


REPORT ON THE WORK OF THE DEPARTMENT

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 23 TAHUN 2011
 TANGGAL : 1 JUNI 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

Satuan : Ton

| No | SUB SEKTOR | UREA | SP-36 | ZA | NPK | ORGANIK |
|----|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1. | TANAMAN PANGAN | 2,359 | 266 | 152 | 1,188 | 272 |
| 2. | HORTIKULTURA | 539 | 25 | 73 | 190 | 47 |
| 3 | PERKEBUNAN | 967 | 154 | 144 | 753 | 95 |
| 4 | PETERNAKAN DAN PERIKANAN BUDIDAYA | 160 | 64.2 | 64 | - | 20.3 |
| | JUMLAH | 4,025 | 509.2 | 433 | 2,131 | 434.3 |

 **BUPATI ROKAN HULU, f**


H. ACHMAD

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 23 TAHUN 2011
 TANGGAL : 1 JUNI 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
 KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

Satuan : Ton

| No | KECAMATAN | B U L A N | | | | | | | | | | | | JUMLAH |
|-----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | |
| 1. | RAMBAH | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 230 |
| 2. | RAMBAH SAMO | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 15 | 310 |
| 3. | TAMBUSAI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 103 |
| 4. | TAMBUSAI UTARA | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 69 |
| 5. | KUNTO DARUSSALAM | 22 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 14 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 219 |
| 6. | BONAI DARUSSALAM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 7. | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
| 8. | UJUNG BATU | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 142 |
| 9. | TANDUN | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 10 | 5 | 147 |
| 10. | KABUN | 15 | 15 | 15 | 20 | 17 | 14 | 4 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 143 |
| 11. | BANGUN PURBA | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 7 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 222 |
| 12. | ROKAN IV KOTO | 30 | 25 | 24 | 15 | 22 | 18 | 5 | 20 | 20 | 20 | 11 | 10 | 220 |
| 13. | PANDALIAN IV KOTO | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 83 |
| 14. | KEPENUHAN HULU | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 70 |
| 15. | KEPENUHAN | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 101 |
| 16. | RAMBAH HILIR | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 140 |
| | JUMLAH | 212 | 218 | 230 | 231 | 234 | 202 | 140 | 198 | 207 | 212 | 160 | 115 | 2,359 |


 BUPATI ROKAN HULU,
 H. ACHMAD

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 23 TAHUN 2011

TANGGAL : 1 JUNI 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

Satuan : Ton

| No | KECAMATAN | B U L A N | | | | | | | | | | | | JUMLAH |
|-----|--------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | |
| 1. | RAMBAH | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 45 |
| 2. | RAMBAH SAMO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 55 |
| 3. | TAMBUSAI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 32 |
| 4. | TAMBUSAI UTARA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 |
| 5. | KUNTO DARUSSALAM | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35 |
| 6. | BONAI DARUSSALAM | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 30 |
| 7. | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 28 |
| 8. | UJUNG BATU | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 28 |
| 9. | TANDUN | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 |
| 10. | KABUN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 |
| 11. | BANGUN PURBA | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 41 |
| 12. | ROKAN IV KOTO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 |
| 13. | PANDALIAN IV KOTO | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 28 |
| 14. | KEPENUHAN HULU | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 |
| 15. | KEPENUHAN | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 28 |
| 16. | RAMBAH HILIR | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 38 |
| | JUMLAH | 47 | 47 | 52 | 51 | 54 | 53 | 44 | 46 | 44 | 44 | 38 | 19 | 539 |

 BUPATI ROKAN HULU, f

H. ACHMAD

STATE OF TEXAS
COUNTY OF _____

THIS DEED WAS RECORDED IN THE PUBLIC RECORDS OF THE COUNTY OF _____, TEXAS, ON _____, 19____, AT _____ O'CLOCK _____ M., BY _____, CLERK OF SAID COUNTY.

THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF _____, BEING THE SEVERAL PARTS OF THE _____ TRACT, _____ ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN ON THE PLAT OF _____, _____, IN THE _____ AND _____ SECTIONS OF THE _____ AND _____ RANGES, COUNTY OF _____, STATE OF TEXAS.

| SECTION | TOWNSHIP | RANGE | ACRES | OWNER |
|---------|----------|-------|-------|----------------|
| 1 | 10N | 10E | 36.00 | STATE OF TEXAS |
| 2 | 10N | 10E | 36.00 | STATE OF TEXAS |
| 3 | 10N | 10E | 36.00 | STATE OF TEXAS |
| 4 | 10N | 10E | 36.00 | STATE OF TEXAS |
| 5 | 10N | 10E | 36.00 | STATE OF TEXAS |
| 6 | 10N | 10E | 36.00 | STATE OF TEXAS |
| 7 | 10N | 10E | 36.00 | STATE OF TEXAS |
| 8 | 10N | 10E | 36.00 | STATE OF TEXAS |
| 9 | 10N | 10E | 36.00 | STATE OF TEXAS |
| 10 | 10N | 10E | 36.00 | STATE OF TEXAS |
| 11 | 10N | 10E | 36.00 | STATE OF TEXAS |
| 12 | 10N | 10E | 36.00 | STATE OF TEXAS |
| 13 | 10N | 10E | 36.00 | STATE OF TEXAS |
| 14 | 10N | 10E | 36.00 | STATE OF TEXAS |
| 15 | 10N | 10E | 36.00 | STATE OF TEXAS |
| 16 | 10N | 10E | 36.00 | STATE OF TEXAS |
| 17 | 10N | 10E | 36.00 | STATE OF TEXAS |
| 18 | 10N | 10E | 36.00 | STATE OF TEXAS |
| 19 | 10N | 10E | 36.00 | STATE OF TEXAS |
| 20 | 10N | 10E | 36.00 | STATE OF TEXAS |

WITNESSETH

that the above described land is the property of the State of Texas.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and the seal of said County at _____, Texas, this _____ day of _____, 19____.

CLERK OF COUNTY

STATE OF TEXAS

COUNTY OF _____

RECORDED

INDEXED

FILED

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 23 TAHUN 2011
 TANGGAL : 1 JUNI 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT
 KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

Satuan : Ton

| No | KECAMATAN | B U L A N | | | | | | | | | | | | JUMLAH | |
|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | | |
| 1. | RAMBAH | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 89 |
| 2. | RAMBAH SAMO | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 73 |
| 3. | TAMBUSAI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 76 |
| 4. | TAMBUSAI UTARA | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 67 |
| 5. | KUNTO DARUSSALAM | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 48 |
| 6. | BONAI DARUSSALAM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 7. | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 8. | UJUNG BATU | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 63 |
| 9. | TANDUN | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 84 |
| 10. | KABUN | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 56 |
| 11. | BANGUN PURBA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 |
| 12. | ROKAN IV KOTO | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 |
| 13. | PANDALIAN IV KOTO | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 45 |
| 14. | KEPENUHAN HULU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 15. | KEPENUHAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 46 |
| 16. | RAMBAH HILIR | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 93 |
| | JUMLAH | 89 | 84 | 80 | 91 | 81 | 76 | 75 | 71 | 78 | 84 | 85 | 85 | 967 | |

BUPATI ROKAN HULU, f



H. ACHMAD

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 23 TAHUN 2011
 TANGGAL : 1 JUNI 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN DAN PERIKANAN BUDIDAYA
 KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

Satuan : Ton

| No | KECAMATAN | B U L A N | | | | | | | | | | | | JUMLAH | |
|--------|--------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|----|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | | |
| 1. | RAMBAH | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 2. | RAMBAH SAMO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 3. | TAMBUSAI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 4. | TAMBUSAI UTARA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
| 5. | KUNTO DARUSSALAM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 6. | BONAI DARUSSALAM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 7. | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8. | UJUNG BATU | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 9. | TANDUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 10. | KABUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 11. | BANGUN PURBA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 12. | ROKAN IV KOTO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 13. | PANDALIAN IV KOTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 14. | KEPENUHAN HULU | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 15. | KEPENUHAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 16. | RAMBAH HILIR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| JUMLAH | | 14 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 16 | 14 | 15 | 12 | 11 | 13 | 160 | |

 BUPATI ROKAN HULU, 
 H. ACHMAD

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 23 TAHUN 2011
 TANGGAL : 1 JUNI 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
 KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

Satuan : Ton

| No | KECAMATAN | B U L A N | | | | | | | | | | | | JUMLAH | | | |
|-----|--------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|----|----|-----|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | | | | |
| 1. | RAMBAH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 2. | RAMBAH SAMO | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 30 |
| 3. | TAMBUSAI | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 4. | TAMBUSAI UTARA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 5. | KUNTO DARUSSALAM | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| 6. | BONAI DARUSSALAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 7. | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 8. | UJUNG BATU | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 9. | TANDUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 10. | KABUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 11. | BANGUN PURBA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 12. | ROKAN IV KOTO | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 13. | PANDALJAN IV KOTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14. | KEPENUHAN HULU | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| 15. | KEPENUHAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 16. | RAMBAH HILIR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | JUMLAH | 25 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17 | 266 |

 BUPATI ROKAN HULU, f

H. ACHMAD

100-100000

100-100000

100-100000

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | BALANCE |
|-------|--------------------|--------|---------|
| 10/1 | RECEIVED FROM BANK | 100.00 | 100.00 |
| 10/2 | PAID TO BANK | 50.00 | 50.00 |
| 10/3 | RECEIVED FROM BANK | 100.00 | 150.00 |
| 10/4 | PAID TO BANK | 50.00 | 100.00 |
| 10/5 | RECEIVED FROM BANK | 100.00 | 200.00 |
| 10/6 | PAID TO BANK | 50.00 | 150.00 |
| 10/7 | RECEIVED FROM BANK | 100.00 | 250.00 |
| 10/8 | PAID TO BANK | 50.00 | 200.00 |
| 10/9 | RECEIVED FROM BANK | 100.00 | 300.00 |
| 10/10 | PAID TO BANK | 50.00 | 250.00 |
| 10/11 | RECEIVED FROM BANK | 100.00 | 350.00 |
| 10/12 | PAID TO BANK | 50.00 | 300.00 |
| 10/13 | RECEIVED FROM BANK | 100.00 | 400.00 |
| 10/14 | PAID TO BANK | 50.00 | 350.00 |
| 10/15 | RECEIVED FROM BANK | 100.00 | 450.00 |
| 10/16 | PAID TO BANK | 50.00 | 400.00 |
| 10/17 | RECEIVED FROM BANK | 100.00 | 500.00 |
| 10/18 | PAID TO BANK | 50.00 | 450.00 |
| 10/19 | RECEIVED FROM BANK | 100.00 | 550.00 |
| 10/20 | PAID TO BANK | 50.00 | 500.00 |
| 10/21 | RECEIVED FROM BANK | 100.00 | 600.00 |
| 10/22 | PAID TO BANK | 50.00 | 550.00 |
| 10/23 | RECEIVED FROM BANK | 100.00 | 650.00 |
| 10/24 | PAID TO BANK | 50.00 | 600.00 |
| 10/25 | RECEIVED FROM BANK | 100.00 | 700.00 |
| 10/26 | PAID TO BANK | 50.00 | 650.00 |
| 10/27 | RECEIVED FROM BANK | 100.00 | 750.00 |
| 10/28 | PAID TO BANK | 50.00 | 700.00 |
| 10/29 | RECEIVED FROM BANK | 100.00 | 800.00 |
| 10/30 | PAID TO BANK | 50.00 | 750.00 |
| 10/31 | RECEIVED FROM BANK | 100.00 | 850.00 |
| TOTAL | | | 850.00 |

STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS, DEPARTMENT OF REVENUE, RECEIPTS FROM THE SALE OF LAND.

RECEIVED OF

FOR

AMOUNT



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 25 TAHUN 2011

TANGGAL : (JUNI 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

Satuan : Ton

| No | KECAMATAN | BULAN | | | | | | | | | | | | JUMLAH | | | |
|-----|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | | | | |
| 1. | RAMBAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | RAMBAH SAMO | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3. | TAMBUSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | TAMBUSAI UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KUNTO DARUSSALAM | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6. | BONAI DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | UJUNG BATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | TANDUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KABUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | BANGUN PURBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12. | ROKAN IV KOTO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13. | PANDALIAN IV KOTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14. | KEPENUHAN HULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | KEPENUHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | RAMBAH HILIR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | JUMLAH | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |

BUPATI ROKAN HULU, A

H. ACHMAD

0-10-10-10

10-10-10-10

| NO | DESCRIPTION | DATE | AMOUNT | BALANCE |
|-----|-------------|------|--------|---------|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... |

...

...

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 23 TAHUN 2011
 TANGGAL : 1 JUNI 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT
 KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

Satuan : Ton

| No | KECAMATAN | B U L A N | | | | | | | | | | | | JUMLAH | | | | |
|-----|--------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|----|----|----|-----|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | | | | | |
| 1. | RAMBAH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2. | RAMBAH SAMO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 3. | TAMBUSAI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 4. | TAMBUSAI UTARA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 5. | KUNTO DARUSSALAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 6. | BONAI DARUSSALAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 7. | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 8. | UJUNG BATU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 9. | TANDUN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 10. | KABUN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 11. | BANGUN PURBA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 12. | ROKAN IV KOTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 13. | PANDALIAN IV KOTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 14. | KEPENUHAN HULU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 15. | KEPENUHAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 16. | RAMBAH HILIR | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| | JUMLAH | 15 | 12 | 13 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 154 |

F
 BUPATI ROKAN HULU, f

H. Achmad

H. ACHMAD

10

1954-55

| Sl. No. | Description | 1953-54 | 1954-55 | 1955-56 | 1956-57 | 1957-58 | 1958-59 | 1959-60 | 1960-61 | 1961-62 | 1962-63 | 1963-64 | 1964-65 | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 | 1969-70 | 1970-71 |
|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

...

...



LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 25 TAHUN 2011
 TANGGAL : 1 JUNI 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN DAN PERIKANAN BUDIDAYA
 KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

Satuan : Ton

| No | KECAMATAN | B U L A N | | | | | | | | | | | | JUMLAH | | | |
|-----|--------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---|---|------|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | | | | |
| 1. | RAMBAH | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2. | RAMBAH SAMO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 3. | TAMBUSAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 4. | TAMBUSAI UTARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 5. | KUNTO DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | BONAI DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | UJUNG BATU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 9. | TANDUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10. | KABUN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11. | BANGUN PURBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 12. | ROKAN IV KOTO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 13. | PANDALIAN IV KOTO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 14. | KEPENUHAN HULU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 15. | KEPENUHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| 16. | RAMBAH HILIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | JUMLAH | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7.2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 64.2 |

[Signature]
 BUPATI ROKAN HULU,
[Signature]
 H. ACHMAD

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 23 TAHUN 2011
 TANGGAL : 1 JUNI 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
 KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

Satuan : Ton

| No | KECAMATAN | BULAN | | | | | | | | | | | | JUMLAH |
|-----|--------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | |
| 1. | RAMBAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 2. | RAMBAH SAMO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 |
| 3. | TAMBUSAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 4. | TAMBUSAI UTARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 5. | KUNTO DARUSSALAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 6. | BONAI DARUSSALAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 7. | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 8. | UJUNG BATU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 9. | TANDUN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 10. | KABUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 11. | BANGUN PURBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 12. | ROKAN IV KOTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 13. | PANDALIAN IV KOTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 14. | KEPENUHAN HULU | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 15. | KEPENUHAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 16. | RAMBAH HILIR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| | JUMLAH | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 152 |



LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 23 TAHUN 2011
 TANGGAL : 1 JUNI 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA
 KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

Satuan : Ton

| No | KECAMATAN | B U L A N | | | | | | | | | | | | JUMLAH | | | |
|-----|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | | | | |
| 1. | RAMBAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2. | RAMBAH SAMO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 3. | TAMBUSAI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 4. | TAMBUSAI UTARA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5. | KUNTO DARUSSALAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 6. | BONAI DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | UJUNG BATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | TANDUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10. | KABUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | BANGUN PURBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12. | ROKAN IV KOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13. | PANDALIAN IV KOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | KEPENUHAN HULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | KEPENUHAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 16. | RAMBAH HILIR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| | JUMLAH | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 73 |



H. ACHMAD

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

Satuan : Ton

| No | KECAMATAN | BULAN | | | | | | | | | | | | JUMLAH | | |
|-----|--------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---|-----|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | | | |
| 1. | RAMBAH SAMO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2. | RAMBAH SAMO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3. | TAMBUSAI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 4. | TAMBUSAI UTARA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 5. | KUNTO DARUSSALAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | BONAI DARUSSALAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7. | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8. | UJUNG BATU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 9. | TANDUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10. | KABUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11. | BANGUN PURBA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 12. | ROKAN IV KOTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 13. | PANDALIAN IV KOTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 14. | KEPENUNGAN HULU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 15. | KEPENUNGAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 16. | RAMBAH HILIR | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 144 |



LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 23 TAHUN 2011
 TANGGAL : 1 JUNI 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN DAN PERIKANAN BUDIDAYA
 KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

Satuan : Ton

| No | KECAMATAN | BULAN | | | | | | | | | | | | JUMLAH | | |
|-----|--------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---|----|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | | | |
| 1. | RAMBAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 2. | RAMBAH SAMO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3. | TAMBUSAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 4. | TAMBUSAI UTARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 5. | KUNTO DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | BONAI DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7. | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | UJUNG BATU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 9. | TANDUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 10. | KABUN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11. | BANGUN PURBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12. | ROKAN IV KOTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 13. | PANDALIAN IV KOTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 14. | KEPENUHAN HULU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 15. | KEPENUHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16. | RAMBAH HILIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | JUMLAH | 9 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 64 |




LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 23 TAHUN 2011
 TANGGAL : 1 JUNI 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK PHONSKA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
 KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

Satuan : Ton

| No | KECAMATAN | BULAN | | | | | | | | | | | | JUMLAH |
|-----|--------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | |
| 1. | RAMBAH | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 108 |
| 2. | RAMBAH SAMO | 10 | 9 | 10 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 6 | 7 | 12 | 15 | 128 |
| 3. | TAMBUSAI | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 3 | 30 |
| 4. | TAMBUSAI UTARA | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 39 |
| 5. | KUNTO DARUSSALAM | 5 | 11 | 10 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 79 |
| 6. | BONAI DARUSSALAM | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 49 |
| 7. | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 67 |
| 8. | UJUNG BATU | 5 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 73 |
| 9. | TANDUN | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 15 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 80 |
| 10. | KABUN | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 72 |
| 11. | BANGUN PURBA | 12 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 93 |
| 12. | ROKAN IV KOTO | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | | 5 | 4 | 8 | 85 |
| 13. | PANDALIAN IV KOTO | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 61 |
| 14. | KEPENUHAN HULU | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 62 |
| 15. | KEPENUHAN | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 72 |
| 16. | RAMBAH HILIR | 9 | 2 | 12 | 14 | 11 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 | 91 |
| | JUMLAH | 110 | 99 | 106 | 121 | 130 | 71 | 71 | 71 | 65 | 73 | 97 | 125 | 1,188 |

F-16
 BUPATI ROKAN HULU, f

 H. ACHMAD

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 23 TAHUN 2011
 TANGGAL : 1 JUNI 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK PHONSKA BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA
 KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

Satuan : Ton

| No | KECAMATAN | BULAN | | | | | | | | | | | | JUMLAH | |
|-----|--------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | | |
| 1. | RAMBAH | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 |
| 2. | RAMBAH SAMO | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 37 |
| 3. | TAMBUSAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | TAMBUSAI UTARA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5. | KUNTO DARUSSALAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 6. | BONAI DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 7. | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 8. | UJUNG BATU | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 9. | TANDUN | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 10. | KABUN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 11. | BANGUN PURBA | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| 12. | ROKAN IV KOTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 13. | PANDALIAN IV KOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 14. | KEPENUHAN HULU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 15. | KEPENUHAN | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 16. | RAMBAH HILIR | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| | JUMLAH | 18 | 16 | 17 | 20 | 19 | 19 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 16 | 20 | 190 |

BUPATI ROKAN HULU, A

H. ACHMAD

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 23 TAHUN 2011
 TANGGAL : (JUNI 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK PHONSKA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT
 KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

Satuan : Ton

| No | KECAMATAN | BULAN | | | | | | | | | | | | JUMLAH | |
|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | | |
| 1. | RAMBAH | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 68 |
| 2. | RAMBAH SAMO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 67 |
| 3. | TAMBUSAI | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 50 |
| 4. | TAMBUSAI UTARA | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 46 |
| 5. | KUNTO DARUSSALAM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 6. | BONAI DARUSSALAM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 7. | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 8. | UJUNG BATU | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 |
| 9. | TANDUN | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 53 |
| 10. | KABUN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 |
| 11. | BANGUN PURBA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 66 |
| 12. | ROKAN IV KOTO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 13. | PANDALIAN IV KOTO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 14. | KEPENUHAN HULU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 15. | KEPENUHAN | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 |
| 16. | RAMBAH HILIR | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 65 |
| | JUMLAH | 70 | 65 | 64 | 69 | 64 | 60 | 58 | 57 | 56 | 59 | 66 | 65 | 65 | 753 |

BUPATI ROKAN HULU, f


H. ACHMAD

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 23 TAHUN 2011
 TANGGAL : (JUNI 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
 KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

Satuan : Ton

| No | KECAMATAN | BULAN | | | | | | | | | | | | JUMLAH | |
|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | | |
| 1. | RAMBAH | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 |
| 2. | RAMBAH SAMO | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 |
| 3. | TAMBUSAI | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 4. | TAMBUSAI UTARA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 5. | KUNTO DARUSSALAM | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 6. | BONAI DARUSSALAM | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 7. | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 8. | UJUNG BATU | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 9. | TANDUN | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 10. | KABUN | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 11. | BANGUN PURBA | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| 12. | ROKAN IV KOTO | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 13. | PANDALIAN IV KOTO | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 14. | KEPENUHAN HULU | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 15. | KEPENUHAN | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| 16. | RAMBAH HILIR | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| | JUMLAH | 44 | 32 | 26 | 35 | 9 | 8 | 15 | 15 | 17 | 21 | 23 | 16 | 272 | |

BUPATI ROKAN HULU, f


H. ACHMAD

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 23 TAHUN 2011
 TANGGAL : (JUNI 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA
 KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

Satuan : Ton

| No | KECAMATAN | B U L A N | | | | | | | | | | | | JUMLAH | | |
|-----|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | | | |
| 1. | RAMBAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2. | RAMBAH SAMO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 3. | TAMBUSAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | TAMBUSAI UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KUNTO DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | BONAI DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | UJUNG BATU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 9. | TANDUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10. | KABUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11. | BANGUN PURBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 12. | ROKAN IV KOTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 13. | PANDALIAN IV KOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | KEPENUHAN HULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | KEPENUHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | RAMBAH HILIR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| | JUMLAH | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 47 | |


BUPATI ROKAN HULU, f

 H. ACHMAD

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 23 TAHUN 2011
 TANGGAL : 1 JUNI 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT
 KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

Satuan : Ton

| No | KECAMATAN | BULAN | | | | | | | | | | | | JUMLAH | | | | |
|-----|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | | | | | |
| 1. | RAMBAH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2. | RAMBAH SAMO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3. | TAMBUSAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 4. | TAMBUSAI UTARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 5. | KUNTO DARUSSALAM | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 6. | BONAI DARUSSALAM | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 7. | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 8. | UJUNG BATU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 9. | TANDUN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 10. | KABUN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 11. | BANGUN PURBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12. | ROKAN IV KOTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 13. | PANDALIAN IV KOTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 14. | KEPENUHAN HULU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 15. | KEPENUHAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 16. | RAMBAH HILIR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| | JUMLAH | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 95 |

BUPATI ROKAN HULU

 H. ACHMAD

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 23 TAHUN 2011
 TANGGAL : 1 JUNI 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN DAN PERIKANAN BUDIDAYA
 KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

Satuan : Ton

| No | KECAMATAN | BULAN | | | | | | | | | | | | JUMLAH | | | |
|-----|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | | | | |
| 1. | RAMBAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2. | RAMBAH SAMO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | TAMBUSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | TAMBUSAI UTARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | KUNTO DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | BONAI DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | UJUNG BATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | TANDUN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | KABUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | BANGUN PURBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12. | ROKAN IV KOTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | PANDALIAN IV KOTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 |
| 14. | KEPENUHAN HULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | KEPENUHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | RAMBAH HILIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | JUMLAH | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.3 | 20.3 |

F. B. BUPATI ROKAN HULU, p

[Signature]

H. ACHMAD